

Penyusunan Masterplan Desa Wisata Halal Kutawaringin Berbasis Masyarakat

Rama Arianto Widagdo^{*1}, Irland Fardhani², Verry Damayanti³, Ernady Syaodih⁴, Hani Burhanudin⁵, Jasmin Putri Ayudia⁶, Alldy Mauludin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Perencanaan Wilayah & Kota, Universitas Islam Bandung, Indonesia

e-mail: ^{*1}rama.ariantowidagdo@unisba.ac.id, ²irland.fardani@unisba.ac.id,

³verrydamayanti0904@gmail.com, ⁴ernadysyaodih@gmail.com,

⁵haniburhan1966@gmail.com, ⁶jasminayudia16@gmail.com, ⁷alldymauludin123@gmail.com

Abstrak

Desa Kutawaringin merupakan satu dari 50 desa rintisan di Kabupaten Bandung yang ditetapkan sebagai desa wisata dengan kekuatan kearifan lokal pada Tahun 2022. Seiring dengan pengembangannya, hingga saat ini Desa Kutawaringin belum memiliki masterplan pengembangan yang dapat mengarahkan pengembangan yang komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek terkait. Masterplan perlu disiapkan sebaik mungkin dan sesuai dengan aspirasi masyarakat agar dokumen yang dihasilkan dapat menjadi arah pembangunan terbaik bagi masyarakat desa. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan Desa Wisata Halal melalui kegiatan sosialisasi dan dari sisi ketersediaan pedoman yang komprehensif berupa Masterplan Desa Wisata Halal. Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Tourism Development. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan focus group discussion lalu diolah menggunakan analisis isi dan analisis spasial. Kegiatan pengabdian ini berhasil menghasilkan suatu desain pengembangan kawasan wisata halal yang menampung aspirasi masyarakat desa dengan baik. Integrasi pendapat dan aspirasi masyarakat lokal menjadi hal yang substansial untuk memastikan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Community Based Development, Desa Kutawaringin, Desa Wisata, Masterplan, Wisata Halal*

1. PENDAHULUAN

Desa Kutawaringin merupakan suatu desa yang terletak di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, khususnya Kabupaten Bandung. Kawasan Metropolitan Bandung Raya secara konsisten mendorong peningkatan sektor pariwisata sejak 1920 melalui dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem yang sesuai [1]. Salah satu bentuk nyata dari dukungan tersebut adalah penetapan Desa Kutawaringin sebagai satu dari 50 desa rintisan wisata di Kabupaten Bandung pada Tahun 2022. Untuk mencapai pengembangan desa wisata yang komprehensif, seluruh desa rintisan perlu menyusun *masterplan* pengembangan yang dapat menjadi acuan dan arahan yang komprehensif dari berbagai aspek terkait. Namun, hingga saat ini Desa Kutawaringin belum berhasil menyusun arahan pengembangan desa wisata yang jelas dan *masterplan* yang dimaksud sehingga pengembangan desa sebagai destinasi wisata tidak berjalan dengan lancar.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan merupakan pendampingan penyusunan *masterplan* Desa Kutawaringin. Berdasarkan diskusi yang dilakukan antara Pemerintah Desa Kutawaringin dan Tim Pengabdian, maka didapatkan “Desa Wisata Halal Kutawaringin berbasis Masyarakat” sebagai visi dari konsep pengembangan yang nantinya

akan diimplementasikan di dalam *masterplan*. *Masterplan* perlu disiapkan sebaik mungkin dan sesuai dengan aspirasi masyarakat agar dokumen yang dihasilkan dapat menjadi arah pembangunan terbaik bagi masyarakat desa. Untuk itu, perlu pemahaman yang merata terkait elemen-elemen yang terkandung pada konsep yang diajukan pada *masterplan*.

Sebelum membahas konsep *masterplan* yang diajukan, perlu dipahami terlebih dahulu terkait desa wisata. Desa Wisata merupakan jenis destinasi wisata yang dikembangkan melalui eksploitasi dan eksplorasi potensi desa berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat dan tradisi yang berlaku [2]. Pengembangan desa wisata yang baik perlu dilakukan dengan berhati-hati dikarenakan di satu sisi dapat meremajakan kawasan, namun aktivitas tambahan yang dikembangkan mampu merusak kekuatan kawasan yang ada bila tidak diperhatikan dengan baik [2]. Oleh karena itu, Desa Kutawaringin sebagai desa wisata perlu dikembangkan dengan prinsip desa wisata agar mampu menyediakan pengalaman wisata yang tepat bagi pasar wisatawan yang tepat.

Prinsip pengembangan pertama yang perlu dipahami bersama adalah prinsip wisata halal. Konsep wisata halal merupakan suatu konsep pengembangan wisata kontemporer yang populer diimplementasikan di seluruh dunia karena mampu meningkatkan kualitas wisata dengan mendukung aktivitas Islami [3]. Konsep wisata halal juga dapat mendorong kepuasan masyarakat terhadap pengembangan yang dilakukan karena pengembangan didasarkan nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai yang diadopsi masyarakat setempat [3]. Saat ini dasar pengembangan desa wisata halal di Indonesia merupakan Fatwa MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Pada peraturan ini, diatur aspek-aspek yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaraan pariwisata syariah, pengembangan hotel syariah, pengembangan destinasi wisata, pengembangan infrastruktur wisata, pengembangan biro perjalanan wisata syariah, dan ketentuan pemandu wisata syariah [4]. Hal ini tentunya perlu diintegrasikan pada Konsep Pengembangan Desa Wisata Halal Kutawaringin nantinya.

Selanjutnya, Fatwa MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah memberikan arahan yang jelas terhadap pengembangan suatu destinasi wisata. Suatu destinasi wisata syariah wajib diarahkan untuk ikhtiar ke arah mewujudkan kemaslahatan umum; pencerahan, penyegaran, dan penenangan; memelihara Amanah, keamanan, dan kenyamanan; Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; serta menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah [4]. Suatu destinasi wisata halal juga wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah dan memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI [4]. Destinasi wisata halal juga wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi; serta pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah [4]. Hal ini perlu diintegrasikan ke dalam konsep pengembangan Desa Wisata Kutawaringin agar desa bisa berhasil menjadi destinasi wisata halal di masa yang akan datang.

Prinsip pengembangan kedua yang perlu dipahami dalam pengembangan Desa Wisata Kutawaringin adalah prinsip pengembangan berbasis masyarakat. Aplikasi dari prinsip pengembangan ini adalah pengikutsertaan masyarakat dalam fase-fase pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam memberikan perspektif mereka menjadi hal yang penting dalam pengembangan wilayah untuk memastikan keberlanjutan yang terjadi setelah pembangunan awal sesuai dengan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat [5,6]. Pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat membantu proses pembangunan secara langsung, misalnya masyarakat yang turut menertibkan pemburu liar di Kawasan Paya Nie [5], masyarakat yang turut mempromosikan produk UMKM di Kelurahan Lamper Lor [7], dan masyarakat yang turut mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Banyumas [8]. Sebagaimana yang telah dibuktikan pada kasus-kasus sebelumnya, masyarakat Desa Kutawaringin juga memiliki potensi besar untuk diikutsertakan dalam proses pengembangan desa wisata dan tidak hanya bertindak di lapangan saat desa wisata telah diimplementasikan di Desa Kutawaringin.

Agar pengembangan desa dapat berjalan sesuai kaidah teknokratis dan lancar, maka pengabdian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan

Desa Wisata Halal melalui kegiatan sosialisasi dan dari sisi ketersediaan pedoman yang komprehensif berupa Masterplan Desa Wisata Halal. Untuk mencapai tujuan ini, maka tim pengabdian melakukan pendampingan proses penyusunan masterplan Desa Kutawaringin kepada pemerintah desa. Pendampingan ini terdiri dari empat tahap dengan dua kegiatan lapangan. Empat tahap yang dilakukan pada pendampingan adalah tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data dan analisis, serta tahap akhir. Dua kegiatan lapangan yang dilakukan adalah observasi wilayah strategis Desa Kutawaringin untuk menentukan potensi dan persoalan pengembangan desa serta *focus group discussion* untuk memastikan kesesuaian konsep pengembangan yang ditawarkan dengan preferensi masyarakat dan memperkaya potensi dan persoalan pengembangan desa dengan perspektif warga lokal.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Community Based Tourism Development* pada ruang lingkup desa wisata. Pengembangan desa wisata berbasis komunitas merupakan suatu jenis pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat lokal untuk bekerjasama dengan tim pengabdian untuk mengembangkan desa melalui dialog untuk mencapai aspirasi kondisi lapangan [9]. Pada tahap pendampingan penyusunan masterplan desa wisata, pengikutsertaan masyarakat utamanya dilakukan pada tahap *focus group discussion* dan didukung pula dengan interaksi pada saat observasi lapangan. Melalui interaksi antara masyarakat dengan tim pengabdian, aspirasi masyarakat yang nantinya akan hidup di desa wisata ini akan terintegrasi dengan konsep pengembangan yang diajukan.

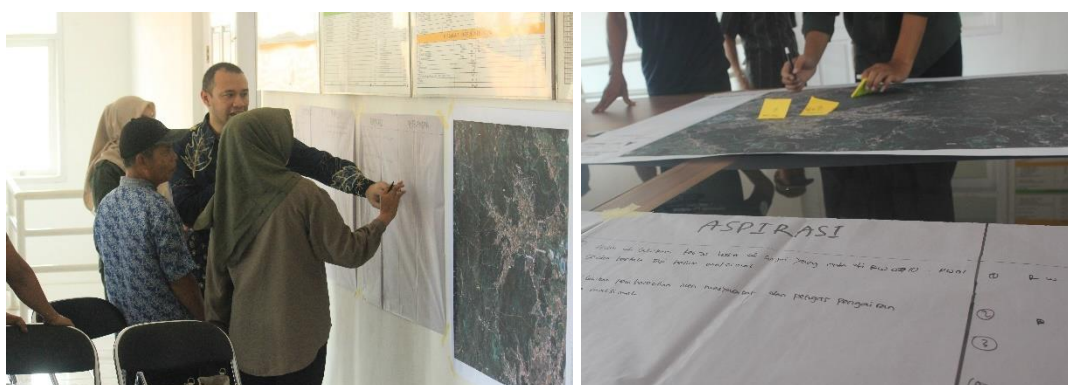


Gambar 1 Interaksi Tim Pengabdian dengan Masyarakat Sebelum Observasi dan saat FGD

Pengumpulan data dan analisis data dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengabdian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik utama, yaitu observasi lapangan dan *focus group discussion* (FGD). Observasi merupakan pendekatan pengumpulan data fenomena yang diteliti secara langsung melalui panca indera yang dimiliki peneliti yang dilakukan untuk membangun teori, memvalidasi percobaan, atau melihat dampak penelitian [10]. Observasi dilakukan untuk memahami langsung kawasan strategis wisata Desa Kutawaringin, yaitu Curug Cipeer, beserta keterhubungan antara kawasan tersebut dengan kawasan lain di Desa Kutawaringin. Kawasan Strategis Curug Cipeer ini lalu dirancang pengembangannya di dalam *masterplan* agar dapat menjadi jangkar utama pariwisata di Desa Kutawaringin.

Teknik pengumpulan data yang kedua untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Kutawaringin adalah FGD. *Focus Group Discussion* merupakan diskusi yang dilakukan untuk membahas topik yang spesifik dengan anggota diskusi yang memiliki perspektif tertentu terhadap topik tersebut dikarenakan kriteria yang dimiliki anggota terhadap topik tersebut [11]. FGD dilakukan dalam pengabdian ini dikarenakan beberapa alasan. Pengumpulan data dan pengidentifikasian permasalahan dapat dilakukan dengan cepat karena narasumber berkumpul bersama dalam pembahasan dan konteks yang diberikan dapat

memudahkan pemahaman tim pengabdian terkait kepercayaan, norma, dan opini sosial [12]. Terkait pengabdian yang dilakukan, metode ini juga dapat memacu semangat peserta FGD dalam implementasi rencana nantinya. FGD juga perlu dilaksanakan agar konsep pengembangan yang diajukan tim pengabdian sesuai dengan dinamika kehidupan yang terjadi di kawasan pengabdian [2]. Pelaksanaan FGD juga diharapkan dapat meningkatkan modal sosial yang dimiliki masyarakat, terutama terkait kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang tentunya dibutuhkan untuk membina Desa Wisata Halal Kutawaringin nantinya [6]. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pendapat peserta FGD yang perlu menjadi perhatian tim pengabdian nantinya, diantaranya lokasi beraktivitas, waktu beraktivitas, latar belakang, dan budaya yang diadopsi [11,12]. FGD yang dilaksanakan tim pengabdian membawa sebuah inovasi, yaitu penggunaan peta partisipatif. Pemetaan partisipatif digunakan untuk memastikan lokasi potensi persoalan dan aspirasi masyarakat yang dapat digunakan untuk mengembangkan Desa Wisata Kutawaringin. Pemetaan partisipatif merupakan proses identifikasi aspek spasial bersama masyarakat atau pemangku kepentingan dengan alat bantu peta dan menggunakan bahasa perpetaan yang mudah dimengerti [13].



Gambar 2 Penggunaan Pemetaan Partisipatif dalam FGD

Data dan informasi yang dikumpulkan lalu diolah menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan bentuk pengolahan informasi kualitatif menjadi beberapa kategori efektif yang memiliki kesamaan makna agar dapat diinterpretasikan secara saintifik [11]. Dengan menggunakan analisis isi, visi, misi, hingga prinsip pengembangan Desa Wisata Kuta Waringin dapat diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan desa. Hasil dari analisis isi lalu diilustrasikan dalam konsep pengembangan dengan preseden yang sesuai.

Mitra tim pengabdian pendampingan penyusunan *masterplan* Desa Wisata Kutawaringin berbasis Masyarakat adalah Pemerintah Desa Kutawaringin. Pemerintah Desa Kutawaringin merupakan pemerintah wilayah administratif desa yang memiliki lokasi kantor di Jalan Raya Cimareme Nomor 4, Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Lembaga pemerintahan yang dikepalai H. Dede Darmawan ini memiliki anggota 15 personil. Desa Kutawaringin sendiri memiliki populasi 8.036 jiwa. Dalam pengabdian ini, mitra memiliki peran terkait koordinasi urusan perencanaan desa dan sumber daya manusia di dalamnya. Elemen sumber daya manusia Desa Kutawaringin yang diikutsertakan adalah masyarakat lokal, mulai dari kepala dusun, tokoh agama dan adat, pemuda lokal, badan usaha milik desa, dan sebagainya yang dilibatkan dalam pengabdian ini. Seluruh pemangku kepentingan tersebut memiliki wawasan tentang potensi desa, sumber daya lokal, dan memahami kebutuhan-kebutuhan desa.

Prosedur pelaksanaan kegiatan pengabdian akan terdiri dari empat tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis, serta tahap akhir. Tahap persiapan terdiri dari aktivitas pembentukan tim pengabdian, interaksi awal dengan mitra, hingga perencanaan kegiatan pengabdian. Pada tahap pengumpulan data dilaksanakan survei sekunder dan primer yang divalidasi melalui FGD 1 yang skalanya tidak terlalu besar. Pada tahap analisis dilaksanakan beberapa pengolahan seperti analisis peningkatan kesadaran potensi wisata halal, analisis pengembangan desa wisata halal dan penetapan konsep dan visi

pengembangan Desa Wisata Kutawaringin. Pada tahap akhir dilaksanakan FGD 2 yang skalanya lebih besar untuk menampung pendapat warga secara lebih menyeluruh, terutama terkait konsep dan visi pengembangan desa yang telah disusun. Hasil dari FGD tersebut lalu disusun menjadi rencana pengembangan yang akan diimplementasikan melalui *masterplan*. Setelahnya dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan kondisi kedua mitra sebelum program dilaksanakan dan setelah program selesai dilaksanakan di kemudian hari. Ilustrasi tahapan pengabdian kepada masyarakat digambarkan pada diagram alir berikut.



Gambar 3 Diagram Alir Prosedur Pelaksanaan PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan langsung observasi lapangan Kawasan antara Kantor Pemerintahan dan Curug Cipeer. Kegiatan observasi lapangan ini memberikan pemahaman awal terkait posisi Desa Kutawaringin saat ini menuju implementasi desa wisata halal berbasis masyarakat dan intervensi apa yang perlu dilakukan oleh tim pengabdian untuk memastikan perkembangan yang terjadi masih berada di dalam koridor. Penggunaan lahan di Desa Kutawaringin saat ini masih mayoritas pertanian, sehingga aktivitasnya masih bergerak pada sektor tersebut, seperti pertanian sawah, hutan, peternakan domba, dan perikanan lele. Desa Kutawaringin juga merupakan desa ekonomi kreatif dengan potensi seni kriya, kuliner, bedas jeans, peyeum singkong, selai pisang, hingga gagang pancingan. Proses produksinya masih berupa industri rumahan yang dikelola secara manual dan konvensional.

Terkait kepariwisataannya, saat ini destinasi wisata di Desa Kutawaringin masih terkumpul di satu titik, yaitu Kawasan Curug Cipeer. Sejumlah potensi wisata kreatif yang beraglomerasi di Curug Cipeer antara lain Bukit Film, Area Hammock, Curug dan Kincir Air Pembangkit Listrik Edukatif, Atraksi Air Perahu Karet dan *Bodyrafting*, Area Kemah, Track dan Rest Area Gowes, Bukit Selfie, dan Bukit Kujang Hade. Terlepas dari sejumlah aktivitas wisata yang terkumpul dengan baik, destinasi wisata ini masih kurang dikenal oleh calon wisatawan sehingga pengunjungnya masih terbatas.



Gambar 4 Destinasi Wisata Curug Cipeer

Kurang dikenalnya destinasi wisata ini bukan dikarenakan aksesibilitas fisik yang kurang seperti desa-desa wisata pada umumnya. Desa Kutawaringin memiliki aksesibilitas yang relatif baik, terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan Stadion Si Jalak Harupat serta pintu Tol Kutawaringin Barat. Pintu Desa Kutawaringin berjarak 4,4 km dari Pintu Tol Kutawaringin Barat atau sekitar 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, kondisi jalan desa sudah optimal bagi kendaraan bermotor dengan perkerasan aspal selebar 4-5 meter.

Amenitas, atau sarana dan prasarana, yang terdapat di Curug Cipeer juga relatif lengkap walaupun masih terdapat banyak perbaikan dan perbaharuan yang bisa dilakukan. Terdapat sejumlah warung yang menjual berbagai makanan olahan khas Kabupaten Bandung yang dalam kondisi baik dengan bangunan semi permanen berbahan kayu. Terdapat beberapa saung yang dapat digunakan untuk duduk, namun kondisinya kurang terawat dan terlihat kumuh. Terdapat satu lokasi toilet umum yang terdiri dari dua bilik terpisah untuk pria dan wanita. Musholla kecil terbuat dari kayu dengan ukuran yang sangat sempit. Musholla ini dapat digunakan maksimal enam orang dan terkesan kumuh. Tersedia satu *viewing deck* untuk menikmati suasana alam, namun tangga utamanya sudah rusak sehingga berbahaya untuk diakses pengunjung. Jembatan Sungai juga dalam kondisi hampir rusak dengan penyangga bagian bawah yang tersisa satu sehingga berbahaya untuk dilewati.



Gambar 5 Kondisi Amenitas Curug Cipeer

Kegiatan pengabdian kedua yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah *focus group discussion* dengan pemangku kepentingan pengembangan Desa Kutawaringin. FGD dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Kutawaringin yang berposisi di tengah wilayah administratif desa agar mudah diakses oleh para peserta FGD. Kegiatan FGD diikuti oleh 18 peserta selain tim pengabdian dan pemerintah desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa Kutawaringin, Ketua RW dan RT, hingga pemuda desa. Kegiatan FGD dimulai dengan pembukaan dari Kepala Urusan Perencanaan Desa Kutawaringin dan Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba. Setelahnya tim pengabdian mempresentasikan temuan observasi dan konsep pengembangan desa wisata yang disusun hingga saat ini.



Gambar 6 Pemerintah Desa Kutawaringin, Ketua Program Studi PWK, dan Presenter Konsep

Setelah mendapatkan informasi dan arahan yang cukup dari presentasi tim pengabdian, peserta FGD lalu dibagi menjadi dua kelompok untuk mengikuti dua kegiatan, yaitu diskusi dan *participatory mapping*. Dua kelompok yang dibagi membahas dua aspek yang berbeda, yaitu aspek umum dan aspek kepariwisataan. Kegiatan dipandu oleh seorang moderator dan beberapa fasilitator untuk memastikan kegiatan berlangsung optimal. Berdasarkan hasil dari kegiatan FGD dengan masyarakat, dirumuskanlah isu strategis pengembangan desa dengan konsep Desa Wisata Halal Kutawaringin berbasis Masyarakat sebagaimana yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Isu Strategis FGD bersama Masyarakat Desa Kutawaringin

Potensi	Persoalan	Aspirasi
A. <u>River Tubing</u>		
Mendapatkan ban hibanan	- Air pada Sungai tergantung pada cuaca. - Masih ada wc umum di jalur Sungai tersebut yang limbahnya dibuang ke jalur <i>river tubing</i>. - Jalan setapak yang menyusuri Sungai masih terhalang ilalang dan tertutup rumput liar. - Di pinggiran sungai masih banyak Semak belukar yang mengganggu alur.	
B. <u>Pesawahan</u>		
- Sudah ada kelompok tani. - Sawah di Desa Kutawaringin merupakan	- Tanah sawah milik desa berada di luar administrasi Desa Kutawaringin. - Arahan untuk menjadikan sawah wisata persawahan	Masyarakat mendukung pengadaan wisata sawah dengan konsep “pengalaman menanam di sawah”.

Potensi	Persoalan	Aspirasi
mayoritas guna lahan. Lahan milik pribadi masyarakat namun berpotensi dikerjasamakan.	belum didukung oleh infrastruktur yang sesuai	Masyarakat mendorong adanya spot swafoto mandiri (<i>selfie</i>) dengan latar persawahan dan pergunungan.
C. <u>Pasar Wisata dan Oleh-Oleh</u>		
Variasi UMKM dan produk lokal yang luas	- Saat ini masih belum banyak dikenal masyarakat umum. - Belum dapat menarik wisatawan untuk membeli barang-barang	
D. <u>Wisata Sepeda</u>		
Banyak pengunjung yang datang ke Desa Kutawaringin dengan tujuan untuk bersepeda	Belum ada peminjaman sepeda untuk mendukung wisatawan yang tidak membawa sepeda milik pribadi	
E. <u>Kampung Jeans</u>		
<i>Branding</i> Kampung Jeans sudah melekat karena usaha kepala desa terdahulu.	Saat ini konveksi jeans tidak stabil sehingga mulai ada yang beralih menjadi konveksi gamis	- Masyarakat mendorong pembangunan <i>mini gallery</i> di Curug Cipeer. - Masyarakat ingin ada fokus untuk mendorong potensi yang sudah ada
F. <u>Flying Fox</u>		
	Keamanan untuk melaksanakan kegiatan ini belum terjamin.	Masyarakat merasa bahwa pemandangan persawahan akan menarik untuk menjadi latar <i>flying fox</i> yang dimulai dari Curug Cipeer.
G. <u>Camping Ground</u>		
Masyarakat Desa Kutawaringin telah memahami dan mengetahui terkait lokasi <i>camping ground</i> yang tersedia di Curug Cipeer	Lokasi <i>camping ground</i> belum tertata dengan baik dan masih berupa hamparan saja.	
H. <u>Wisata Kuliner</u>		
Desa Kutawaringin memiliki banyak UMKM makanan yang telah dikenal sejak lama, misalnya produksi Peyeum.	- Sumberdaya manusia masih belum memadai kegiatan UMKM yang berkualitas. - Terdapat beberapa UMKM makanan yang baru berdiri namun belum terekspos.	
I. <u>Kebudayaan</u>		
Desa Kutawaringin memiliki beberapa kesenian turun-temurun, seperti Tari Jaipongan, Pencak Silat, Hadroh Al-Ansor (seni musik).	Keberadaan beberapa seni budaya ini mulai pudar.	

Isu strategis yang dirumuskan pada sesi FGD lalu diintegrasikan dengan konsep pengembangan kawasan. Konsep pengembangan kawasan ini yang nanti akan menjadi arahan utama pada *masterplan* pengembangan Desa Wisata Halal Kutawaringin Berbasis Masyarakat. Berdasarkan pengamatan langsung pada kegiatan FGD, terdapat perbedaan animo peserta antara sebelum dan setelah pelaksanaan. Sebelum FGD dimulai, peserta tampak enggan untuk berdiskusi dengan tim pengabdian. Sebagian peserta datang terlambat dan memilih untuk bermain dengan *gadget* masing-masing dibandingkan bersosialisasi di ruangan. Beberapa sekilas memperhatikan peta-peta yang tertempel di beberapa bagian ruangan, namun kembali fokus pada *gadget* masing-masing setelahnya. Namun, setelah pelaksanaan FGD, seluruh peserta secara antusias berdiskusi dengan tim pengabdian dan tidak langsung meninggalkan ruang FGD. Tidak hanya berinteraksi dengan pengajar dari tim pengabdian, namun mahasiswa yang turut serta ke dalam tim pengabdian juga mendapatkan ajakan untuk mengkaji proses FGD yang telah dilaksanakan. Diskusi-diskusi ini berlanjut hingga tim meninggalkan lokasi, hingga proses bersih-bersih ruangan dilakukan sambil berdiskusi terkait kondisi Desa Kutawaringin. Antusiasme ini menunjukkan semangat warga untuk meningkatkan kualitas desa tempat tinggal mereka yang mulai timbul akibat keterbukaan yang dihasilkan kegiatan FGD. Diharapkan antusiasme ini dapat berlanjut hingga partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Halal Kutawaringin dapat memberi kebermanfaatan yang nyata.



Gambar 7 Diskusi Pasca FGD yang Terjadi antara Tim Pengabdian, Peserta, dan Mitra

Adapun kesulitan saat pelaksanaan kegiatan adalah waktu persiapan yang kurang, lingkup observasi yang relatif sempit, serta peserta FGD yang kurang menyeluruh. Kurangnya waktu persiapan mengakibatkan pemerataan informasi antara tim pengabdian kurang efektif, namun hal ini dapat ditutupi dengan saling mendukung selama proses pengabdian sehingga proses tersebut masih lancar. Lingkup observasi yang sempit mengakibatkan hanya Curug Cipeer yang dapat diobservasi secara mendetail, sedangkan titik-titik potensi wisata lainnya hanya diobservasi secara sekilas. Namun, kekurangan ini ditutupi dengan diskusi bersama warga yang diminta menceritakan titik-titik tersebut kepada tim pengabdian. Peserta FGD yang kurang menyeluruh dikarenakan sulitnya menemukan waktu temu seluruh pemangku kepentingan yang optimal. Alhasil, tim pengabdian berfokus pada masyarakat desa yang menjadi inti dari konsep pengembangan berbasis masyarakat. Sebaiknya pihak eksternal seperti calon investor, calon potensi wisatawan, dan pemerintah kabupaten perlu turut hadir dalam FGD pengembangan berbasis masyarakat. Namun, secara umum kesulitan-kesulitan ini hanya kesulitan minor dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Proses pengembangan kawasan wisata sudah sewajarnya menjadi kegiatan komprehensif yang didukung oleh seluruh pemangku kepentingan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan Desa Wisata Halal melalui kegiatan sosialisasi dan dari sisi ketersediaan pedoman yang komprehensif berupa Masterplan Desa

Wisata Halal. Hal ini tercapai dengan baik melalui interaksi positif antara tim pengabdian, mitra, dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti observasi dan *focus group discussion*. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi yang menghasilkan suatu arahan pengembangan yang jelas dan aplikatif bagi pengembangan Desa Wisata Halal Kutawaringin berbasis masyarakat. Selanjutnya diharapkan pihak yang dapat mengikuti kegiatan kolaborasi ini bisa semakin luas, misalnya sektor privat, investor, hingga media massa. Berdasarkan evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui penyampaian aspirasi dalam forum yang mendukung.

5. SARAN

Pengabdian masyarakat ini secara relatif telah dilaksanakan menyeluruh, namun perbaikan terkait variasi peserta FGD dapat dilakukan agar mampu menampung aspirasi yang beragam sebagai input penyusunan *masterplan* suatu desa wisata. Diharapkan kolaborasi yang positif yang berhasil dimunculkan pada FGD ini dapat dilanjutkan pada pengabdian atau penelitian lainnya yang dilaksanakan di Desa Kutawaringin di masa yang akan datang. Kegiatan lanjutan yang dapat dilaksanakan setelah *masterplan* diresmikan adalah memulai pembangunan dan peremajaan kawasan, pengembangan titik-titik wisata, serta pengembangan alternatif promosi melalui media-media terkini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Pendampingan Penyusunan Masterplan Desa Wisata Halal Kutawaringin berbasis Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini hingga terjadi. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung atas dukungan finansial dan masukan ide yang diberikan dalam pengadaan kegiatan ini. Terima kasih kepada mitra kami, Pemerintah Desa Kutawaringin, atas kepercayaannya kepada tim dalam penyusunan *masterplan* bersama inovasi-inovasi yang diimplementasikan. Terima kasih kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah mendukung kami melaksanakan program ini dan selalu siap berdiskusi positif terkait perkembangan penelitian dan pengabdian yang terjadi. Terima kasih kepada Masyarakat Desa Kutawaringin yang telah menyambut kami dengan baik serta mau terbuka menyampaikan aspirasi pembangunan yang dimiliki tanpa keraguan. Terima kasih kepada Jurnal Abdimas Politeknik Harapan Bersama Tegal yang berkenan menjadi media publikasi pengabdian yang telah kami lakukan beserta masukan konstruktif yang diberikan. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan membaca jurnal ini dan berkenan bersama membangun bangsa untuk menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Damayanti, V., Ekasari, A.M., dan Syaodih, E, 2019, The Determinants of Cultural Tourism Attractions Based on Tourist Satisfaction in the Sundapolis Area, Bandung City, *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes), Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 409, hal. 538-541.
- [2] Widagdo, R.A., Burhanudin, H., Weishaguna, Saraswati, Asyiwati, Y., Barwanto, L.A., Pratama, A., Febriyandani, M.R., Nurhasanah, H., dan Serdani, S.D., 2024, Mengenali Isu Strategis Pengembangan Kawasan Desa Wisata Edukasi Kopi Rasagalar, Kabupaten Bandung, *Journal of regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, vol. 8 (1), hal. 11-29.

- [3] Burhanudin, H., Weishaguna, Saraswati, Asyiawati, Y., Barwanto, L.A., Widagdo, R.A., Pratama, A., Febriyandani, M.R., Nurhasanah, H., dan Serdani, S.D., 2023, Rasagalar Coffee Education Tourist Attraction design based on Halal Tourism in Mekarmanik Village, Bandung Regency, *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes), KNE Life Sciences*, hal. 1572-1588.
- [4] Dewan Syariah Nasional MUI, 2016, *Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah*.
- [5] Wahyuni, S., Zubaidah, S., Iriadi, R., Malik, A., dan Abbas, R., 2023, Pemberdayaan Masyarakat Paya Nie dalam Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Abdimas PHB*, vol. 6 (4), hal. 1196-1202.
- [6] Utami, V.Y., 2020, Dinamika Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma, *Reformasi*, vol.10 (1), hal. 34-44.
- [7] Setiyono, T.A., Vestari, M., Yusuf, M., Hamdani, M., dan Attiq, K., 2023, Pendampingan Pembuatan Media Sosial UMKM di Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, *Jurnal Abdimas PHB*, vol. 6 (4), hal. 1171-1178.
- [8] Tahyudin, I., Oyabu, T., Sholikhatin, S. A., Saefullah, U., Ilham, R. A., dan Rozak, R.A., 2024, Transformasi Wisata: Meningkatkan Pengalaman Wisata Melalui Pemanfaatan Teknologi Virtual Reality, *Jurnal Abdimas PHB*, vol. 7 (1), hal. 21-27.
- [9] Fardani, I., Kurniasari, N., Syaodih, E., Rochman, G.P., Pradifta, F.S., dan Tarlani, 2023, Pendampingan Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) Berbasis Perencanaan Partisipatif, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, vol. 7 (2), hal. 72-84.
- [10] Cash, P., Hicks, B., Culley, S., dan Adlam, T., 2015, A foundational observation method for studying design situations, *Journal of Engineering Design*, hal. 1-33.
- [11] Moretti, F., Vliet, L., Bencing, J., Deledda, G., Mazzi, M., Rimondini, M., Zimmermann, C., dan Fletcher, I., 2011, A Standardized approach to qualitative content analysis to focus group discussions from different countries, *Patients Education and Counseling*, vol. 82, hal 420-428.
- [12] Hennink, Monique M., 2017, Cross-Cultural Focus Group Discussions, R.S. Barbour dan D.L. Morgan (eds.), *A New Era in Focus Group Research*, hal. 59-82.
- [13] Fardani, I., 2018, Participatory Mapping Solution for Village Potential and Boundary, *The 9th International Conference of Rural Research and Planning Group*, hal. 194-208.